

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Studi Kasus Tahun 2023

Mella Adzkia Salsabila^{1*}, Ahmad Riyan Musyafi²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : zayyifaadzki@gmail.com, ahmadriyan0802@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received September 21, 2024 Revised November 26, 2024 Accepted December 15, 2024 Available online December 31, 2024 *Corresponding author email : zayyifaadzki@gmail.com Keywords: Fiscal Policy, Infrastructure Development, Economic Growth	Introduction/Main Objectives: Infrastructure development is crucial for driving economic growth and societal well-being in Indonesia. Fiscal policy, particularly government spending and taxation, plays a central role in supporting infrastructure projects. However, the impact of fiscal policy on infrastructure development in Indonesia, especially in 2023, remains underexplored. This study aims to analyze the influence of fiscal policy on infrastructure development. Research Methods: Using a qualitative approach with a literature review, this research examines relevant journals, government reports, and official documents on fiscal policy and infrastructure development. The analysis focuses on fiscal expenditure and tax policies that impact infrastructure investment. Finding/Results: The findings reveal that increased fiscal spending on infrastructure and tax reforms have significantly contributed to accelerating infrastructure development in Indonesia. The effectiveness of these policies has enhanced investment and the quality of infrastructure projects. Additionally, collaboration between central and local governments has been identified as a crucial factor for successful implementation. Conclusion: In conclusion, effective fiscal policies, improved coordination, and refined tax policies are crucial for efficient infrastructure development and economic growth in Indonesia.
Page: 66-78	Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai sekitar 10,6%, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Selain itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat secara signifikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sekitar Rp 423,6 triliun untuk belanja infrastruktur, yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)).

Teori keynesian menyatakan bahwa intervensi pemerintah, khususnya melalui pengeluaran publik, dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Keynes, ketika pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur, akan tercipta multiplier effect yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong investasi swasta. Dalam konteks Indonesia, peningkatan infrastruktur diharapkan dapat memperbaiki konektivitas antar wilayah dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien agar dana yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang maksimal ([Noviana, 2020](#)).

Menurut penelitian ([Munawaroh dkk. 2021](#)) Infrastruktur mencakup lebih dari sekadar pembangunan transportasi seperti jalan dan jembatan, tetapi melibatkan penyediaan fasilitas dasar di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, seperti akses transportasi yang lebih baik, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata, serta jaringan listrik, air, dan telekomunikasi yang memadai, berkontribusi pada peningkatan produktivitas masyarakat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas barang dan orang menjadi lebih efisien, mengurangi biaya logistik serta meningkatkan akses pasar bagi bisnis. Investasi dalam infrastruktur dapat mendukung kegiatan ekonomi dan juga membuka peluang untuk perkembangan di masa depan ([Munawaroh & Haryanto, 2021](#)).

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia secara komprehensif. Artikel ini akan membahas berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2023 dan juga dari kebijakan fiskal yang diterapkan terhadap infrastruktur di Indonesia, sehingga dapat membantu menganalisa tentang keefisiensi kebijakan fiskal terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Diharapkan, dengan memahami hubungan ini, pembaca dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diambil dari berbagai sumber pustaka yang relevan seperti berita resmi, jurnal, dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui pencarian di intrnet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap teks-teks yang diperoleh untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan topik penelitian ([Sugiono, 2010](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2023

Fiskal merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu *fiscus* yang berarti Pemilik Kekuasaan Keuangan Utama pada Zaman Romawi Kuno. Di sisi lain, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Mengartikan fiskal sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara atau bayar pajak. Kebijakan fiskal pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883 ([Ardiansyah, 2020](#)). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Pajak ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang ditimbulkan oleh aktivitas pemerintahan. Kebijakan fiskal merupakan bagian berasal kebijakan ekonomi makro yang dipergunakan untuk mencapai target pembangunan ([Kebijakan fiskal, 2024](#)).

Kebijakan fiskal dari sudut pandang ekonomi makro dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif dirancang untuk mengekang inflasi yang cepat, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk mendorong ekonomi dan menghindari resesi. Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi APBN, dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil daripada pengeluarannya. Prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat atau laju pertumbuhan inflasi, jumlah kesempatan kerja atau pengangguran dan saldo neraca pembayaran.

Apabila APBN defisit, pemerintah hanya mempunyai dua pilihan untuk membiayai saldo negatif tersebut, yaitu didanai oleh Bank Indonesia lewat printing money yang berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat, atau melebihi pinjaman, baik dari dalam negeri, misalnya dengan menerbitkan obligasi, atau dari luar negeri (cara yang kedua ini berarti ekonomi tidak lagi tertutup). Karena opsi pertama tersebut sangat berisiko terhadap peningkatan laju inflasi, maka biasanya opsi kedua yang dipilih ([Irawan, 2024](#)).

Pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2023 sangat terkait dengan kebijakan fiskal yang dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan fiskal, menetapkan prioritas untuk pembangunan

infrastruktur sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam RAPBN 2023, alokasi anggaran untuk infrastruktur diperkirakan mencapai antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun, yang mencakup berbagai proyek penting seperti perumahan, air minum, dan konektivitas transportasi ([Kemensetneg, 2022](#)). Kebijakan fiskal yang diterapkan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan memprioritaskan belanja infrastruktur, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi nasional ([Menkeu, 2022](#)).

Infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendorong mobilitas dan konektivitas, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan revitalisasi industri. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Secara keseluruhan, hubungan antara pembangunan infrastruktur dan kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai stimulus ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai landasan bagi pertumbuhan jangka panjang. Dengan fokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih kuat ([Khairuna., dkk, 2024](#)).

Kebijakan Fiskal di Indonesia tahun 2023

Kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2023 disusun untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan produktivitas melalui beragam program prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah telah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun, dengan fokus pada lima agenda utama. Agenda-agenda tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang ([Kemensetneg, 2022](#)).

Salah satu fokus utama dari kebijakan fiskal adalah penguatan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp595,9 triliun hingga Rp563,6 triliun, dengan tujuan untuk mendukung beasiswa bagi siswa dan mahasiswa serta tunjangan bagi tenaga pendidik. Selain itu, belanja kesehatan juga akan mengalami peningkatan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan yang lebih baik, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai antara Rp193,7 triliun hingga Rp155 triliun. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan dengan lebih baik ([KPPN, 2023](#)).

Pembangunan infrastruktur menjadi agenda kedua yang sangat penting dalam kebijakan fiskal tahun 2023. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun untuk proyek-proyek vital seperti perumahan, penyediaan air minum, dan konektivitas transportasi. Dengan investasi tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi ekonomi serta meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan fiskal juga terfokus pada stabilisasi harga dan perlindungan daya beli masyarakat di tengah tantangan inflasi global. Pemerintah merencanakan untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target defisit berkisar antara 2,81% hingga 2,95% dari PDB (PGR, 2022).

Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2023

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya sistematis untuk menciptakan dan memperbaiki fasilitas fisik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di suatu negara. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam kepemimpinan Jokowi kita melelihat banyak pembangunan besar besaran, baik itu dari fasilitas pelayanan masyarkat, industri pemberdaya masyarakat dan terfokus pada akses jalan hingga pembangunan ini masuk pada daerah daerah plosok. Dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia yang menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp392 triliun untuk sektor infrastruktur, meningkat 7,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Fokusnya termasuk proyek strategis nasional (PSN) seperti pembangunan bendungan, jalan tol, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) (Wisnubroto, 2023). Selain itu, pemerintah menekankan pemerataan pembangunan dengan memprioritaskan daerah terpencil dan desa. Contohnya adalah penyelesaian Trans-Papua, pembangunan kawasan pariwisata strategis seperti Mandalika dan Labuan Bajo, serta pengembangan pelabuhan dan bandara (KPPN, 2023).

Hal ini bertujuan meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan menciptakan sentra ekonomi baru yang berkelanjutan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan menngkatkan pendapatan. Selain itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur, maka dalam menjalan kannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjun langsung dengan anggaran Rp125,18 triliun yang cukup besar. Fokusnya adalah penyelesaian proyek-proyek yang sudah berjalan, termasuk infrastruktur ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan optimalisasi infrastruktur yang sudah selesai. Dengan pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), pemerintah memastikan infrastruktur dapat berfungsi maksimal.

Pada sektor strategis lainnya, pemerintah juga mempercepat pengembangan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan IKN. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diluncurkan pada tahun 2023 membuka peluang besar bagi investor untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga dan pusat pemerintahan yang baru. Dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp24,97 triliun, proyek ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas dasar, termasuk jalan tol, bendungan, dan jaringan utilitas yang mendukung operasi pemerintah. Lebih dari 350 surat niat dari investor domestik dan asing telah diterima, menunjukkan minat yang tinggi terhadap proyek ini. Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi di sektor-sektor lain, seperti perumahan dan komersial ([Konstruksi Indonesia, 2023](#)).

Selain itu, proyek IKN juga memiliki tujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang efisien, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Secara keseluruhan, IKN Nusantara menjadi simbol transformasi nasional yang berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan ([Wisnubroto, 2023](#)). Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing global Indonesia, mengurangi biaya logistik, dan memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas dan generasi mendatang.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2023

Berikut ini adalah peluang pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2023, antara lain:

1. Peningkatan Anggaran Kementerian PUPR. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun untuk tahun 2023, yang telah disetujui oleh Komisi V DPR RI. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional dan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas di seluruh Indonesia. Fokus utama penggunaan anggaran ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum. Selain itu, kementerian juga meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah ada melalui pendekatan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR) ([Kemenkeu, 2022](#)).
2. Program Padat Karya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk program padat karya pada tahun 2023. Program ini ditargetkan dapat menyerap sekitar 712 ribu tenaga kerja, yang diharapkan berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur berskala kecil, program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendistribusikan dana hingga ke desa-desa. Melalui pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek lokal, diharapkan

program ini akan menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang diperlukan di berbagai daerah ([Faruq, 2022](#)).

3. Penciptaan Lapangan Kerja. Proyek infrastruktur besar membawa dampak yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Selama tahap konstruksi, ribuan pekerja diperlukan, mulai dari tenaga kerja terampil hingga pekerja kasar. Setelah proyek selesai, infrastruktur yang telah dibangun mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, seperti industri manufaktur dan layanan. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol dapat meningkatkan akses ke pabrik dan pusat distribusi, sehingga menciptakan lebih banyak pekerjaan di sekitarnya. Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan ([Direktorat Jendral Bina Kontruksi, 2023](#))

Selain peluang, terdapat juga tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2023, antara lain:

1. Munculnya masalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena koordinasi yang kurang baik. Ketidakselarasan dalam kebijakan politik ekonomi yang diterapkan oleh kedua tingkat pemerintahan ini dapat menghambat efektivitas pembangunan infrastruktur. Contohnya, perbedaan dalam pengalokasian anggaran atau adanya regulasi yang saling bertentangan dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proyek infrastruktur yang sedang berjalan. Selain itu, kurangnya komunikasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan lancar ([Wepo, 2023](#)).
2. Kurangnya pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur, yang mengakibatkan adanya kesenjangan infrastruktur yang signifikan di seluruh negeri. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran, kebutuhan investasi yang diperlukan tetap jauh lebih besar untuk memenuhi standar infrastruktur yang pantas. Keterbatasan dana ini sering kali menghalangi pelaksanaan proyek, memperlambat kemajuan pembangunan, dan menciptakan ketimpangan antara wilayah yang sudah berkembang dengan daerah terpencil yang belum mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi inovatif dalam pembiayaan dan meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengatasi tantangan ini ([Saragi, 2023](#)).
3. Masyarakat sering kali menentang pembangunan infrastruktur karena takut kehilangan rumah dan sumber penghidupan mereka. Ketika proyek infrastruktur seperti pembangunan waduk atau jalan direncanakan, warga yang tinggal di lokasi tersebut merasa terancam, karena tanah yang mereka huni dan kelola dapat diambil alih tanpa persetujuan yang cukup. Salah satu contoh penolakan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2023 adalah kasus Rempang Eco-City di Batam. Pada tanggal 23 Agustus 2023, ribuan masyarakat adat melakukan unjuk

rasa menolak relokasi 16 kampung adat di Pulau Rempang. Mereka menyatakan bahwa walaupun tidak menolak proyek pembangunan tersebut mereka menolak untuk dipindahkan dari kampung halaman mereka yang telah menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan selama bertahun-tahun. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat tentang kehilangan rumah dan sumber penghidupan sebagai akibat dari proyek infrastruktur yang direncanakan tanpa melibatkan aspirasi mereka secara signifikan ([Puspita, 2023](#)).

Strategi dan kebijakan pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2023.

Strategi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat memperbaiki konektivitas, mengurangi biaya logistik, dan menarik investasi, semua yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ([Universitas Medan Area, 2023](#)). Berikut adalah strategi pemerintah yaitu Menteri PUPR dalam Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang direncanakan untuk tahun 2020-2024, antara lain:

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan untuk tahun 2015-2019 guna mendukung pengembangan wilayah, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Bandara dan Pelabuhan, serta kawasan produktif lainnya. Kedua, Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam sektor konstruksi melalui sertifikasi tenaga kerja dan program link and match (Magang) bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri Sertifikasi tenaga kerja konstruksi memberikan pengakuan resmi terhadap keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. ([Putri & Kristianto, 2023](#)).
2. Pengembangan strategi pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lain bertujuan untuk menarik minat investor dalam proyek infrastruktur. Keempat, memperkuat dan membuka peluang kerja bagi kontraktor nasional/lokal juga menjadi fokus utama dalam pengembangan infrastruktur. Melalui regulasi dan kebijakan pemaketan, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada kontraktor lokal agar dapat bersaing dalam proyek-proyek besar. Kelima, menyederhanakan regulasi dan birokrasi, merupakan langkah penting untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Revisi terhadap peraturan menteri yang menghambat diharapkan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin dan menyelesaikan administrasi proyek. Dengan mengoptimalkan proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur dapat dimulai dan diselesaikan tepat waktu ([Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, 2020](#)).

Selain strategi, Pemerintah juga mempunyai kebijakan dalam Pembangunan infrastruktur di Indonesia tahun 2023, yaitu antara lain:

1. Kebijakan Fiskal yang Mendukung. Pemerintah Indonesia merencanakan penerapan kebijakan fiskal yang akan mendukung pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada penguatan anggaran untuk proyek-proyek yang menjadi prioritas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga akan meningkatkan daya saing nasional. Kebijakan fiskal yang efektif akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang serta stabilitas ekonomi ([Adzam et al., 2024](#)).
2. Regulasi yang mendukung. Reformasi birokrasi dan regulasi diharapkan dapat mempercepat proses perizinan serta pelaksanaan proyek infrastruktur, yang merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan mengurangi hambatan administratif, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien bagi investor dan pelaksanaan proyek. Penyederhanaan prosedur perizinan akan memungkinkan proyek-proyek infrastruktur dapat dimulai lebih cepat, sehingga mempercepat dampak positif terhadap ekonomi. Selain itu, regulasi yang lebih baik akan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur ([Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023](#)).
3. Peningkatan Kerjasama Internasional. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dan lembaga internasional guna mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam pembangunan infrastruktur ([Putri, 2024](#)). Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memanfaatkan pengalaman dan teknologi dari negara lain untuk meningkatkan efisiensi proyek infrastruktur. Selain itu, dukungan finansial dari lembaga internasional akan membantu mengatasi keterbatasan anggaran yang ada. Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan di tahun 2023 ([Universitas Medan Area, 2023](#)).

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2023

Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan fiskal guna memperkuat pembangunan infrastruktur, yang mencakup alokasi anggaran yang signifikan, pemberian insentif kepada para investor, dan penerapan

skema pembiayaan yang inovatif. Diharapkan, kebijakan-kebijakan ini mampu meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas infrastruktur di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu manfaat positif dari kebijakan fiskal terhadap pembangunan infrastruktur adalah peningkatan investasi di sektor ini ([KPPN, 2023](#)).

Dengan mendistribusikan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, pemerintah memberikan sinyal yang jelas kepada para investor bahwa sektor ini mendapat prioritas utama. Di samping itu, pemberian insentif seperti pengurangan pajak dan kemudahan dalam perizinan juga mampu menarik perhatian investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Hal ini tercermin pada meningkatnya investasi di sektor infrastruktur sepanjang tahun 2023. Dampak lain dari kebijakan fiskal adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya anggaran yang memadai, proyek-proyek infrastruktur dapat dilaksanakan dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi.

Selain itu, skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private Partnership (PPP) juga berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur, sehingga mempercepat proses pembangunan. Meskipun kebijakan fiskal memberikan dampak positif untuk pembangunan infrastruktur, penting untuk diingat bahwa kebijakan ini harus didukung oleh kebijakan lain yang sejalan. Sebagai contoh, pemerintah perlu menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Indonesia ([PGR, 2022](#)).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang terfokus pada peningkatan pengeluaran untuk proyek infrastruktur serta perbaikan sistem perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur, ditambah dengan kebijakan perpajakan yang mendukung investasi, terbukti meningkatkan kualitas dan jumlah infrastruktur yang dibangun. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tepat dan terarah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia.

Maka untuk menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat konsistensi dan efektivitas kebijakan fiskal yang telah diterapkan. Penyempurnaan koordinasi antara berbagai level pemerintahan dan pemanfaatan optimal anggaran, ditambah dengan reformasi perpajakan yang lebih efisien, akan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur berjalan dengan

lancar. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mempermudah distribusi barang dan jasa, serta mempercepat proses pembangunan ekonomi di berbagai sektor, mendukung visi Indonesia Maju 2045.

REFERENSI

- Ardiansyah, F. (2020). Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal. <https://doi.org/10.1/Faris%20ardiansyah%20-191020700126.Pdf>
- Badan Pusat Statistik, I. (2023). Statistik Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>
- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. (2020). <https://pembiayaan.pu.go.id/news/detail/86/kebijakan-dan-strategi-pemerintah-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-masa-new-normal>
- Irawan, Edi. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur | Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi, Vol 2. <https://prin.or.id/index.php/JURRIE/article/view/1898>
- Humas. (2022, Juni 17). Menkeu: APBD Harus Selaras Dengan Arah Kebijakan Fiskal Dan Prioritas Nasional. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/menkeu-tekankan-apbd-harus-selaras-dengan-arah-kebijakan-fiskal-dan-prioritas-nasional/>
- Kebijakan Fiskal. (2024). In Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebijakan_Fiskal&oldid=25926901
- Faruq, Kemal. (2022). Kementerian PUPR Alokasikan Dana Rp14,34 Triliun Untuk Program Padat Karya Pada 2023 | Ivoox Indonesia S. https://ivoox.id/kementerian-pupr-alokasikan-dana-rp-14-34-triliun-untuk-program-padat-karya-pada-2023?tag_from=cukai-rokok
- Kemenkeu. (2022). Pembangunan Infrastruktur Jadi Salah Satu Fokus APBN 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/fokus-apbn-2023>
- Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2023a). Terobosan Reformasi Birokrasi KLHK: Pangkas Birokrasi, Tingkatkan Prestasi. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7568/terobosan-reformasi-birokrasi-klhk-pangkas-birokrasi-tingkatkan-prestasi>
- Konstruksi Indonesia 2023: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Di Indonesia Melalui Transformasi Digital Dan Teknologi Konstruksi - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. (2023, June 15). <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/konstruksi-indonesia-2023-mewujudkan-pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-di-indonesia-melalui-transformasi-digital-dan-teknologi-konstruksi/>

- KPPN, R. (2023, Juni 16). Pokok – Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bangko/Id/Data-Publikasi/Artikel/2871-Serial-Mengenai-Arah-Fokus-Kebijakan-Fiskal-2023.Html>
- Kristantyo Wisnubroto, Indonesia.Go.Id—Peluang Dan Tantangan Kerja Proyek Pembangunan IKN Nusantara. (2023). <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Editorial/7563/Peluang-Dan-Tantangan-Kerja-Proyek-Pembangunan-Ikn-Nusantara?Lang=1>
- Melynda Dwi Puspita. (2023, September 15). 10 Proyek Pemerintah Yang Ditolak Masyarakat, Ada Rempang Hingga IKN | Tempo.Co. Tempo. <https://Www.Tempo.Co/Ekonomi/10-Proyek-Pemerintah-Yang-Ditolak-Masyarakat-Ada-Rempang-Hingga-Ikn-143682>
- Adzam, Muh. Etania, Avita Ransi. Alviyani, Fikhri Aufi. Pentingnya Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan | Jurnal Kendali Akuntansi. (2024). <https://Ifrelresearch.Org/Index.Php/Jka-Widyakarya/Article/View/2958>
- Munawaroh, S., & Haryanto, T. (2021). Pengembangan Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua. Media Trend, 16(1), Article 1. <https://Doi.Org/10.21107/Mediatrend.V16i1.7454>
- Negara, K. S. (2022). Pemerintah Akan Fokuskan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 Dukung Pemulihan Ekonomi | Sekretariat Negara. https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Pemerintah_Akan_Fokuskan_Kebijakan_Fiskal_Tahun_2023_Dukung_Pemulihan_Ekonomi
- Noviana, L. (2020, Agustus 12). Teori Keynesian Dalam Ekonomi. <https://Pluang.Com/Blog/Glossary/Keynesian-Economy>
- PGR. (2022). Simak! Ini Dia 5 Fokus Kebijakan Fiskal APBN 2023. CNBC Indonesia. <https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20220816134724-4-364226/Simak-Ini-Dia-5-Fokus-Kebijakan-Fiskal-Apbn-2023>
- Putri -, M., & Kristianto, A. H. (2023). Link And Match Program Magang Mbkm Institut Shanti Bhuana Dalam Aspek Sumber Daya. Jurnal Pengabdian Bukit Pengharapan, 3(1), Article 1.
- Putri, A. M. (2024). Strategi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Bantuan Luar Negeri Jepang Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2), Article 2. <https://Doi.Org/10.61511/Pips.V1i2.2024.850>
- Saragi, M. (2023). Membangun Infrastruktur Berkelanjutan: Kontribusi Insinyur Sipil Untuk Masa Depan. Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan, 4(1), Article 1. <https://Doi.Org/10.24036/Jkpl.V4i1.177>
- Universitas Medan Area. (2023, October 24). Investasi Dan Infrastruktur Indonesia – Fakultas Ekonomi Terbaik Di Sumut. <https://Ekonomi.Uma.Ac.Id/2023/10/24/Investasi-Dan-Infrastruktur-Indonesia/>
- Khairuna, Wan Ridha. Harahap, Alya Febrina. Amalia, Delvi Dede. Wahyuni, Futri. Manurung, Grace Silvia. (2024). Pengaruh Program Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) | Jurnal

Ekonomi Dan Manajemen.

<https://Journal.Admi.Or.Id/Index.Php/JEKMA/Article/View/1407>

Wepo. (2023, Juni 3). Politik Ekonomi Dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia – Ekonomi Syariah. <https://An-Nur.Ac.Id/Esy/Politik-Ekonomi-Dan-Tantangan-Pembangunan-Infrastruktur-Di-Indonesia.Html>